

# Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Oleh:

**Mahifal, SH., MH**

*Pengajar Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Sosial Budaya Dasar Universitas Pakuan*

## ABSTRAK

Persaingan ekonomi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat peta kekuatan dunia berubah-ubah adalah fenomena globalisasi yang harus dihadapi. Selain itu, faktor SDM yang kuat harus benar-benar dipersiapkan agar segenap tantangan dan ancaman global tersebut dapat diantisipasi. Upaya antipasi yang paling mungkin dilakukan adalah mempersiapkan SDM yang matang dan ditopang oleh pengetahuan dan pandangan hidup yang universal. Dan, Indonesia memiliki Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Dalam konteks ini, maka pembinaan ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan seoptimal mungkin harus dilakukan dalam rangka mempersiapkan SDM yang matang untuk membangun dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Membangun keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa dilakukan secara parsial melainkan membutuhkan peran segenap komponen bangsa. Peran tersebut harus dimulai sejak dini dengan memberikan dasar-dasar dan pandangan hidup universal. Nilai universal dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat terdapat dalam Pancasila sebagai dasar dan falsafah bangsa Indonesia.

Peran bersama antar komponen bangsa, pemerintah, swasta dan masyarakat benar-benar diperlukan untuk membangun dan menggiring semangat dan wawasan kebangsaan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembinaan ideologi Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Muatan pendidikan yang diberikan didesain untuk menumbuhkembangkan semangat persatuan dan kesatuan ditunjang oleh pandangan dan wawasan nusantara serta pribadi yang merupakan bagian dari bangsa yang besar yang tahu akan status diri dan lingkungannya.

**Kata Kunci:** NKRI, keutuhan bangsa, SDM, pembinaan ideologi, Pancasila pendidikan kewarganegaraan

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki lebih kurang 17.480 buah pulau dan menjadikannya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi dan kekayaan alam berlimpah. Luas wilayah Indonesia mencapai lebih kurang 7,7 juta km<sup>2</sup>, dimana 2/3 dari luasan tersebut merupakan wilayah perairan, sehingga tidaklah mengherankan bilamana Indonesia merupakan negara dengan garis pantai terpanjang ke-2 di dunia (setelah Kanada), yaitu sepanjang ± 95.181 km. Secara geografis, Indonesia berada pada silang dunia yang sangat strategis, yaitu terletak diantara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Hindia dan Pasifik), dimana keduanya merupakan kawasan paling dinamis dalam percaturan dunia, baik secara ekonomis maupun politis.

Berdasarkan catatan dan peninggalan sejarah, bangsa Indonesia memiliki hubungan erat dengan kehidupan dan tata pemerintahan maritim. Nenek moyang bangsa Indonesia diduga berasal dari Kawasan Asia Tenggara Yunani-Indochina. Migrasi penduduk diperkirakan telah terjadi pada 5000 tahun SM dan pada 2000 tahun SM melalui laut. Peninggalan pada jaman pra sejarah mengindikasikan adanya penguasaan teknologi pembuatan perahu dan kemampuan mengarungi lautan nusantara dan singgah di kawasan sekitarnya.

Pada jaman Hindu-Budha mulai menyebar di kepulauan Nusantara. Kerajaan-kerajaan Nusantara pun melakukan kegiatan maritim aktif, baik intra insular ataupun ekstra insular, hingga ke India dan Cina. Kekayaan komoditas perdagangan dari sumberdaya alam dan posisi geografis yang strategis kepulauan nusantara, menjadikan wilayah ini berkembang sebagai jalur perdagangan dan transportasi penting. Kerajaan Sriwijaya mendapatkan masa kejayaannya dengan visi kemaritimannya untuk menguasai jaringan transportasi dagang, komoditas dan pelabuhan, terutama di sekitar Selat Malaka. Selain itu kerajaan Sriwijaya dikenal dengan pemerintahan maritim kuat dan efektif yang disegani di kawasan tersebut.

Di Jawa, kerajaan Hindu Majapahit mencapai puncak kejayaannya menguasai wilayah nusantara dengan kekuatan maritim yang menjadi modal dasar untuk melakukan kolonisasi, ekspansi dan penetrasi budaya di zaman tersebut. Wilayah kekuasaannya menyebar hingga kerajaan bawahan yang memiliki pelabuhan dan komoditas dagang vital terutama beras. Kapal-kapal dan para pelaut Jawa tercatat dalam kronik-kronik seperti di Sukodaya - Thailand dan Pegu - Myanmar sebagai manifestasi kejayaan negara maritim Majapahit.

Sementara itu, kerajaan dan kesultanan Islam pesisir utara Jawa, Demak - Bintara, Tuban, Lasem dan Jepara melanjutkan tradisi maritim Majapahit sekaligus menyebarkan agama Islam dan menantang keberadaan kekuatan maritim Portugis yang mulai dirasakan menguasai perdagangan komoditas rempah-rempah. Pada masa yang sama, Banten pun berkembang menjadi kekuatan maritim yang mengendalikan wilayah barat Nusantara dan mengendalikan perdagangan lada. Peran kekuatan maritim Demak digantikan oleh Mataram yang sampai abad ke - XVII masih dapat diperhitungkan sebagai negara maritim.

Di kepulauan Nusantara bagian Timur, Kesultanan Makasar dan konfederasi kerajaan etnis Bugis (Bone, Sawito, Luwu, Tanete dan lain-lain) yang berwawasan Maritim menjadi dua kekuatan yang mengendalikan wilayah perdagangan dan wilayah komoditas. Sifat diaspora (penyebaran) kedua kelompok etnis ini membuat mereka hadir dimana-mana dan dapat mempertahankan budaya Maritimnya hingga sekarang, meskipun kedua kerajaan tersebut pun tidak sanggup menghadapi kekuatan maritim imperialis Barat. Kesultanan Ternate dan Tidore, yang menguasai sumber komoditas sangat penting seperti rempah-rempah, mengendalikan pula perdagangan dan jaringan transportasi serta komunikasi Wilayah Timur Nusantara. Tradisi insularitas kedua kesultanan ini sangat terlihat dan merupakan satu ciri pemahaman geostrategi '*perfect isolation*' di Kepulauan Nusantara.

Kedudukan dan keberadaan Indonesia dalam kancah global saat ini tentu tidak akan terlepas dari adanya pengaruh global. Bukan lagi penjajahan dalam arti sempit yang akan dihadapi di era globalisasi ini. Akan tetapi Indonesia akan menghadapi tantangan global

yang bilamana tidak diantisipasi dapat menimbulkan rentanitas keutuhan negara. Persaingan ekonomi dan perkembangan IPTEK telah mengubah peta kekuatan dunia dan merupakan fenomena globalisasi yang harus dihadapi. Selain itu, faktor SDM yang kuat harus benar-benar dipersiapkan agar segenap tantangan dan ancaman global tersebut dapat diantisipasi. Upaya antipasi yang paling mungkin dilakukan adalah mempersiapkan SDM yang matang dan ditopang oleh pengetahuan dan pandangan hidup yang universal. Dan, Indonesia memiliki Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Oleh karena itu, pembinaan ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan seoptimal mungkin harus dilakukan dalam rangka mempersiapkan SDM yang matang untuk membangun dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **2. PELUANG DAN TANTANGAN GLOBAL**

### **2.1. Peluang dan Tantangan Kekuatan Bangsa**

Indonesia memiliki potensi sumber kekayaan alam (SKA) yang sangat besar, baik di daratan, lautan dan dirgantara, baik yang bersifat hayati maupun non hayati, serta yang dapat diperbaharui (*renewable*) maupun yang tidak dapat diperbaharui (*non renewable*). Hal ini merupakan keunggulan komparatif (*comparative advantage*) yang dapat dijadikan modal dan kekuatan dalam pembangunan nasional. Namun demikian, pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumber kekayaan alam-nya masih dilakukan serampangan. Pola-pola pemanfaatan jangka pendek (*short term utilization*) yang cenderung destruktif dan berlebihan lebih banyak dipraktekkan dibandingkan dengan orientasi pemanfaatan jangka panjang (*long-term utilization*) yang mengutamakan pola pemanfaatan optimal dan berkelanjutan. Bahkan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam pemanfaatan dan distribusi hasil pemanfaatan acapkali terabaikan. Praktek pemanfaatan illegal (*illegal utilization*), pemanfaatan yang tidak tercatat (*un-reported utilization*) dan pemanfaatan yang tidak beraturan (*un-regulated utilization*) semakin meraja rela di negeri ribuan pulau ini.

Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih kurang 250 juta jiwa merupakan asset bangsa yang sangat besar dan merupakan keunggulan SDM secara komparatif, selain juga menjadi salah satu pangsa pasar terbesar dunia. Namun demikian, potensi SDM ini memerlukan penanganan yang baik dalam konteks kesehatan, pendidikan dan penyediaan lapangan pekerjaan, sehingga dapat bersaing dengan SDM Negara lain.

Dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat Indonesia berpegang teguh pada ideologi Pancasila. Pancasila telah diterima sebagai satu-satunya azas dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Namun demikian, implementasi jiwa dan semangat yang terkandung dalam Pancasila tidak sepenuhnya diamalkan, bahkan dewasa ini penyimpangan terhadap sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seolah-olah semakin menjauh dari bangsa ini. Dan ini merupakan kelemahan yang patut untuk diminimalisasi, sehingga cita-cita pendiri bangsa agar Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia benar-benar dapat diimplementasikan secara utuh dan menyeluruh.

Sistem perpolitikan Negara yang mengedepankan musyawarah dan mufakat merupakan warisan pendiri bangsa dan merupakan kekuatan yang tidak terbantahkan untuk mencapai kemajuan bersama. Prinsip mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan selalu menjadi prinsip dasar kehidupan berpolitik bangsa. Sistem demokrasi Pancasila ini sedianya menjadi modal utama untuk menjadikan Indonesia sejajar dengan Negara lain dan menjadi teladan dalam kehidupan bernegara. Namun demikian, sistem ini mulai terkikis seiring maraknya sistem dan praktek politik yang mengedepankan kekuasaan sebagai tujuan utamanya semakin melanda negeri ini. Hal ini tentu harus diantisipasi dan diminimalisasi agar prinsip mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan dapat diwujudkan.

Kekuatan ekonomi nasional saat ini ditopang oleh sektor primer dan sekunder. Keberadaan sumber kekayaan alam yang demikian besar telah memberikan kekuatan ekonomi berbasis sumberdaya alam dan lingkungan. Namun demikian, kekuatan ekonomi seperti ini perlu diiringi dengan pengembangan sistem perekonomian berbasis nilai tambah (*added value*), sehingga dibutuhkan sistem perindustrian yang lebih baik. Selain itu, praktek perekonomian biaya tinggi (*high cost economy*) masih kerap berlaku di Indonesia, sehingga dapat menghambat pembangunan nasional.

Kekuatan bangsa Indonesia dalam konteks sosial-budaya adalah terletak pada kebhinekaannya. Bhineka Tunggal Ika sebagai motto Negara telah menjadi dasar pandangan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat bahwa Indonesia adalah sebuah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Artinya bahwa warna dan ragam suku merupakan khasanah kehidupan, tetapi jiwa dan semangatnya tetap satu, yaitu berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia dan bertanah air satu tanah air Indonesia. Namun demikian, ketika kebhinekaan tersebut tidak dapat dibina dengan baik, maka bukan tidak mungkin NKRI akan terancam keberadaannya.

Dalam bidang pertahanan dan keamanan, Indonesia mengenal sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (SISHANKAMRATA) yang notabene menjadi strategi perjuangan yang mumpuni yang dilakukan para pejuang bangsa di seantero negeri persada yang dilakukan serempak dan tidak kenal menyerah untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Doktrin HANKAMRATA ini serta dengan diundangkannya UU No.20/1982 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara memberikan pondasi kuat sistem pertahanan dan keamanan Indonesia. Namun demikian, SISHANKAMRATA ini belum sepenuhnya diwujudkan, karena masih banyak terjadi riak-riak kecil yang jika tidak dapat diantisipasi dalam menjadi gelombang besar yang mengancam keutuhan bangsa Indonesia, terutama dengan semakin maraknya kriminalitas dan ancaman terorisme di negeri tercinta ini.

## **2.2. Tantangan Global Masa Kini**

Globalisasi begitu cepat hadir dan bercengkerama dengan kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini. Fenomena global ini tentu membawa angin perubahan terhadap kondisi

kemasyarakatan di masa mendatang. Kecepatan arus informasi dalam mendistribusikan opini dan berita publik telah sedemikian cepatnya merubah pandangan dan wawasan seseorang. Keterbatasan jarak dan waktu dewasa ini telah dapat dipangkas secara cepat, sehingga mempermudah arus migrasi barang dan jasa maupun manusia telah sedemikian rupa menjamah ranah sosial antar warga Negara di dunia, sehingga proses akulturasi menjadi sebuah keniscayaan yang terjadi dewasa ini. Proses perubahan yang demikian cepat akibat globalisasi tersebut membawa dampak yang tidak kecil bagi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat rakyat Indonesia. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bilamana kekhawatiran akan hilangnya nilai-nilai luhur budaya dan peradaban bangsa Indonesia yang bakal tergantikan dengan nilai-nilai global menjadi isu utama yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Terlebih lagi, dewasa ini semakin berkurangnya pemahaman dan pengamalan Pancasila dan UUD 1945 telah sedemikian nampak berlaku di kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Budaya gotong royong dewasa ini cenderung tergantikan dengan budaya konvensasi atau membayar orang untuk menggantikan pekerjaan yang seharusnya dapat dilakukan secara bersama-sama. Budaya musyawarah untuk mufakat cenderung semakin terpinggirkan oleh budaya voting untuk menentukan sebuah keputusan. Demikian juga budaya silaturahmi yang mengutamakan tatap muka dan jabat tangan cenderung tergantikan dengan budaya obrolan melalui telepon genggam atau rumah, kendati jaraknya hanya 5 atau 10 menit perjalanan.

Fenomena ini tentu harus diwaspadai, karena nilai-nilai luhur untuk senantiasa bertenggang rasa, saling hormat menghormati, tolong menolong, berwelas asih dan berkekeluargaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sudah semakin luntur dijiwai oleh warga Negara Indonesia dewasa ini. Mahasiswa Indonesia dewasa ini lebih cenderung menyukai turun ke jalan untuk berdemonstrasi ketimbang berlomba-lomba menulis opini dalam menanggapi setiap persoalan yang melanda negeri. Padahal di era globalisasi ini, aksi-aksi demonstratif yang tidak terarah dan sporadis cenderung merugikan motor ekonomi yang seharusnya berjalan untuk mencapai tujuan utama pembangunan ekonomi, yaitu kesejahteraan masyarakat. Para pejabat negeri cenderung ingin mempertahankan status quo demi kepentingan pribadi atau golongan sehingga cenderung mencari segala cara untuk mempertahankan kekuasaan yang dimilikinya saat ini. Beberapa kasus terakhir yang terjadi, seperti kasus Century, kasus Mafia Pajak, kasus Markus di kejaksaan dan kepolisian serta masih banyak lagi yang belum terbongkar, semakin mempertontonkan kepada kita semua akan adanya distorsi dan lunturnya sistem nilai kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang seharusnya mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

Fenomena lainnya yang kerap hadir di bumi ibu pertiwi ini adalah konflik kepentingan yang dipicu hal yang sangat sepele. Sekelompok pemuda saling serang dan saling menyakiti tanpa henti hanya karena persoalan sepele, kendati perdamaian telah dilakukan beberapa kali. Sejumlah pekerja saling pukul dan saling bunuh hanya karena pembagian hasil dan upah berbeda Rp.20.000. Bahkan yang lebih mengesankan, ketika kakak beradik saling bacok dan atau seorang anak tega membunuh ayah dan ibu kandungnya hanya karena persoalan harta warisan. Potret ini tidak jarang terjadi di negeri ini yang telah digadang-gadang sebagai negeri yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab. Bentrok

antar warga hanya karena persoalan buruknya komunikasi dan tingginya kesenjangan sosial sering terjadi. Bahkan persoalan dan benturan sosial sering terjadi di ibukota republik ini sendiri, begitu rentannya persoalan ekonomi hingga menimbulkan bentrok antar kelompok preman jalanan yang juga menghilangkan lebih dari satu jiwa. Sungguh hal ini menjadi potret memprihatinkan kehidupan bermasyarakat bangsa ini yang dahulu terkenal sebagai masyarakat yang sopan santun, welas asih, toleran dan saling menghargai serta baik budi. Apakah ini pertanda bahwa bangsa ini telah mengalami kemunduran akhlak dan perilaku? Apakah ini pertanda bahwa mental brutal dan berontak yang cenderung biadab telah merasuki puteri-puteri ibu pertiwi? Dan, apakah ini pertanda bahwa ada yang salah dalam sistem pendidikan kita, sehingga nilai-nilai luhur para pendahulu dan pejuang kemerdekaan bangsa ini tidak terwariskan kepada generasi sekarang?

Proses akulturasi sudah begitu sarat terjadi di negeri tercintanya. Bahkan fenomena akulturasi ini telah merambah ke dunia kejahatan. Bagaimana sekelompok orang yang menamakan dirinya sebagai pembawa perubahan membentuk kelompok elit untuk melakukan kejahatan perampokan dan teror yang berbuntut kepada pencitraan ketidakamanan dan ketidaknyamanan di negara kesatuan yang berbentuk republik ini. Kelompok bersenjata melakukan perampokan bank yang disertai dengan aksi pembunuhan terhadap petugas keamanan. Bahkan yang lebih memprihatinkannya lagi, mereka sudah berani melakukan penyerangan terhadap salah satu kantor Kepolisian Republik Indonesia yang notabene merupakan penjaga dan pelayan masyarakat dalam hal keamanan dan kenyamanan. Hal ini tentu tidak bisa dibiarkan, karena sudah menyangkut harkat dan martabat bangsa sebagai sebuah negara yang menjunjung tinggi hukum sebagai tatanan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Aksi-aksi teror lainnya yang dilakukan seolah semakin menunjukkan bahwa terorisme telah menjadi bagian dari budaya global, karena hal ini terjadi di mana-mana di setiap belahan bumi ini. Aksi pemboman terhadap kantor-kantor, mall, hotel dan prasarana publik lainnya tidak jarang dilakukan. Dan, hal ini semakin memperkuat opini bahwa teror tersebut merupakan cara untuk membuat ketidakaturan, ketidakamanan dan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat.

### **3. NEGARA DAN WAWASAN KEBANGSAAN INDONESIA**

#### **3.1. Ideologi, Falsafah dan Dasar Negara**

Marsudi (2003) menyebutkan bahwa ideologi berasal dari kata Yunani *Idien* yang artinya melihat atau *Idea* yang berarti raut muka, perawakan, gagasan, buah pikiran, sedangkan *Logia* berarti ajaran. Dengan demikian, ideologi secara harfiah dapat diartikan sebagai ajaran atau ilmu yang mempelajari tentang gagasan atau buah pikiran (*science des idea*). Dalam ensiklopedi populer *ideologi* merupakan cabang filsafat yang mendasari ilmu-ilmu *pedagogi, etika* dan *politik*.

Marsudi (2003) mengidentifikasi pengertian ideologi dari beberapa pakar sesuai dengan bidang keilmuannya, seperti : (i) **Padmo Wahjono** yang menyebutkan bahwa ideologi

sebagai kesatuan yang bulat dan utuh dari ide-ide dasar; (ii) **Mubyarto** yang mendefinisikan ideologi sebagai jumlah Doktrin, kepercayaan dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau satu bangsa yang menjadi pegangan atau pedoman Karya (Perjuangan) untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa; (iii) **M. Sastraprteja** yang mendefinisikan ideologi sebagai seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisir suatu sistem yang teratur; (iv) **Soerjanto Poespowardojo** (pakar sosiologi Budaya) yang menyebutkan bahwa ideologi adalah kompleks pengetahuan dan nilai, yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya; serta (v) **Franz Magnis Suseno** (Pakar Filsafat) yang menuturkan bahwa dalam arti luas kurang tepat Istilah ideologi digunakan untuk segala kelompok cita-cita, nilai dasar dan keyakinan-keyakinan yang mau dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif.

Marsudi (2003) menyimpulkan bahwa ideologi dalam arti praktis dapat didefinisikan sebagai kesatuan gagasan-gagasan yang disusun secara sistematis dan dianggap menyeluruh tentang Manusia dan kehidupannya baik yang individual maupun yang sosial, sedangkan penerapan ideologi dalam kehidupan kenegaraan disebut “Politik” sehingga Ideologi sering dimanfaatkan untuk tujuan tertentu misalnya untuk merebut kekuasaan. Ideologi dalam kehidupan kenegaraan dapat diartikan sebagai suatu konsensus mayoritas warga negara tentang nilai-nilai dasar yang ingin diwujudkan dengan mendirikan negara (*Grondslag* atau *Weltanschauung*) yang merupakan buah pikiran-pikiran terdalam, hasrat terdalam untuk di dirikan suatu Negara.

Indonesia menempatkan Pancasila sebagai ideologi, falsafah dan pandangan hidup dalam berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Pancasila lahir sebelum Indonesia memproklamkan kemerdekaannya, yaitu tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila kemudian dijadikan sebagai dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Rumusan Pancasila diabadikan dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat. Dan hal ini menunjukkan bahwa Pancasila merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari UUD 1945, demikian sebaliknya. Penjabaran dari Pembukaan UUD 1945 alinea keempat diatas dituangkan kembali, secara tertulis dan tidak tertulis. Secara tertulis diwujudkan dalam berbagai aturan-aturan dasar/pokok seperti dalam Batang Tubuh UUD 1945 dalam bentuk pasal-pasalnya dan dalam wujud berbagai Ketetapan MPR dan UU turunannya. Sedangkan secara tidak tertulis terpelihara dalam konvensi atau kebijaksanaan ketatanegaraan.

Pancasila sebagai ideologi digunakan sebagai alat pemersatu bangsa. Namun demikian, disamping sebagai pemersatu bangsa, setiap sila dan butir-butir Pancasila juga mencerminkan bahwa Pancasila juga dijadikan warna, sifat dan karakter bangsa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dalam pengertian: (i) Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, (ii) Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, (iii) Pancasila sebagai perjanjian luhur Bangsa Indonesia ketika mendirikan Negara, (iv) Pancasila sebagai Cita-cita dan tujuan Bangsa Indonesia, dan (v) Pancasila sebagai falsafah hidup dan Ideologi Bangsa Indonesia.

Lebih lanjut, Marsudi (2003) menyebutkan bahwa Pancasila merupakan ideologi terbuka yang bersifat universal. Namun demikian, penting untuk memahami bahwa Pancasila mempunyai karakteristik sendiri dan unik, sehingga Pancasila harus difahami secara komprehensif dan menyeluruh. **Pertama**, Pancasila sebagai ideologi mencerminkan seperangkat nilai terpadu dalam kehidupan politiknya bangsa Indonesia, yang sebagai tata nilai yang dipergunakan sebagai acuan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. **Kedua**, semua gagasan-gagasan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditata secara sistematis menjadi satu kesatuan yang utuh. **Ketiga**, sebagai Ideologi Pancasila berlaku sebagai Pedoman dan acuan dalam menjalankan aktivitas di segala bidang, dan karena itu sifatnya harus terbuka, luwes dan fleksibel, dan tidak bersifat tertutup maupun kaku, yang akan menyebabkan ketinggalan jaman. **Keempat**, Pancasila telah memenuhi syarat sebagai Ideologi terbuka hal ini dibuktikan dari adanya sifat-sifat yang melekat pada pancasila itu sendiri maupun kekuatan yang terkandung didalamnya yaitu memenuhi persyaratan kualitas 3 (tiga) dimensi, yaitu (i) realita, (ii) idealisme dan (iii) fleksibilitas/pengembangan. Dan, **kelima**, pengertian Pancasila sebagai Ideologi terbuka bukanlah berarti bahwa nilai dasarnya dapat diubah atau diganti dengan nilai dasar lain, karena bila dipahami secara demikian merupakan suatu pemahanan yang keliru, hal ini sama dengan meniadakan pancasila.

### **3.2.Wawasan Kebangsaan**

Motto kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat Indonesia adalah “Bhineka Tunggal Ika”, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Indonesia mempunyai ribuan pulau dengan ragam suku yang berbeda, karakter sosial berbeda, bahasa lokal berbeda, dan pandangan hidup yang berbeda, namun dengan semangat dan pandangan yang melekat di dalam Pancasila yang telah disepakati sebagai nilai bersama, maka perbedaan tersebut menjadi sebuah asset bangsa yang sangat luar biasa. Dan bersama Pancasila inilah kemudian perbedaan tersebut disatukan dan dijadikan sebagai nilai dasar dan falsafah hidup bersama yang tertuang di dalam lima silanya.

Persamaan pandangan nilai ini pulalah yang kemudian membentuk sebuah pandangan atau wawasan bersama atau lebih tepat dijadikan sebagai wawasan kebangsaan. Dan, dikarenakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar yang ketika jaman kerajaan Majapahit disatukan dalam wadah nusantara, maka wawasan kebangsaan yang seyogianya dibangun adalah wawasan nusantara, karena cakupan pengetahuan anak bangsa haruslah bersifat universal di seantero wilayah nusantara. Keluasan pandangan ini kemudian diharapkan dapat membentuk kesamaan niat untuk tetap bersatu dan menjaga keutuhan bersama untuk tetap berada dalam rangkulan dan balutan NKRI.

#### **3.2.1. Wawasan Nasional**

Wawasan Nasional menurut Buku Pendidikan Kewiraan adalah pandangan, tinjauan atau bahkan tanggap inderawi untuk mengetahui isi serta arti pengaruh-pengaruh tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Wawasan Nasional adalah cara



pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung (interaksi dan interrelasi) serta pemekarannya dalam bernegara, lingkungan nasional, regional maupun global. Prinsip-prinsip yang menjadi dasar perkembangan suatu Wawasan Nasional adalah (i) geopolitik dan (ii) geostrategis. Istilah geopolitik dikembangkan pertama kali oleh Frederich Ratzel (1844-1904) dengan memperkenalkan ilmu *Political Geography* (Ilmu Bumi Politik), dimana fokus ilmunya adalah mempelajari fenomena geografi dari aspek politik.

Pengetahuan ini kemudian diperluas oleh Rudolf Kjellen (1864-1922), seorang Sarjana Ilmu Politik Swedia, dan oleh Karl Haushofer (1869-1946) dari Jerman dengan memperkenalkan ilmu *Geographycal Politic*, dimana fokus ilmunya mempelajari fenomena politik dari aspek geografi yang menyangkut masalah kependudukan, ekonomi, sosial dan pemerintahan. Dalam konteks ini pulalah, geopolitik kemudian dapat diartikan sebagai suatu ilmu penyelenggaraan negara yang kebijakan-kebijakannya dikaitkan terutama dengan masalah geografi tempat rakyat suatu bangsa berada.

Pandangan bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, tidak mengenal teori adu kekuatan atau adu kekuasaan di dalam menjelaskan pemahaman tentang wawasan kebangsaan, karena teori adu kekuatan atau adu kekuasaan mengandung benih-benih persengketaan dan ekspansionisme. Pandangan bangsa Indonesia lebih menekankan kepada bagaimana menjamin persatuan dan kesatuan bangsa (ke dalam) dan menegakkan kepentingan bangsa dan negara di forum dunia (ke luar). Oleh karena itu, bangsa Indonesia di dalam berpolitik selalu mengedepankan pandangan geostrategi, dimana politik dalam pelaksanaannya dilakukan sebagai upaya bagaimana mencapai segala sesuatu yang diinginkan oleh politik. Pandangan ini juga merupakan suatu seni yang implementasinya didasari intuisi, perasaan dan pengalaman, disamping juga merupakan ilmu, karena berkaitan dengan data dan fakta yang ada. Seni dan ilmu digunakan untuk membina dan mengelola sumber daya yang dimiliki dalam suatu rencana dan tindakan, dimana strateginya disusun untuk menjangkau masa depan dan disusun secara bertahap.

### 3.3.2. Wawasan Nusantara

Wawasan berasal dari bentukan kata dasar wawas yang diartikan sebagai pandangan, dimana secara umum diartikan sebagai cara pandang yang mencakup makna tentang cara maupun substansinya. Nusantara berasal dari bentukan kata dasar nusa dan antara. Nusa berarti sebagai pulau, sedangkan antara berarti diapit diantara dua, yaitu dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Pasifik dan Hindia).

Dengan demikian **Wawasan Nusantara** dapat diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan memperhatikan kondisi geografi, latar belakang sejarah dan kondisi sosial budayanya dalam rangka hendak mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Sifat dan ciri-ciri pokok wawasan nusantara adalah adanya kepedulian terhadap lingkungan internal (mawas ke dalam) dan lingkungan eksternal (mawas ke luar). Mawas ke dalam berarti berupaya untuk

mewujudkan segenap aspek kehidupan bangsa dan negara serta berusaha untuk mewujudkan suatu kesatuan dan persatuan yang bersifat manunggal dan utuh menyeluruh antara wadah, isi dan tata laku. Sedangkan mawas ke luar adalah berupaya menampilkan wibawa sebagai wujud sikap kesatuan, persatuan dan kebulatan wadah, isi dan tata laku.

Wawasan nusantara mempunyai tiga landasan yuridis, yaitu (i) Landasan Konsepsi Kewilayahan Republik Indonesia, (ii) Landasan Idiil dan (iii) Landasan Konstitusional. Landasan konsepsi kewilayahan Republik Indonesia diantaranya adalah : (i) Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957; (ii) Undang-Undang Nomor 4/PP/1960; (iii) Konferensi PBB tentang Hukum Laut III tanggal 30 April 1982; (iv) Pengakuan Asas *Archipelagic State Principle* dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Jamaika tanggal 10 Desember 1982 dan dihadiri oleh 117 negara; dan (v) Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada tanggal 18 Oktober 1983. Adapun landasan riil wawasan nusantara adalah falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Berdasarkan falsafah Pancasila, landasan riil wawasan nusantara adalah bahwa Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan memiliki naluri, akhlak dan daya fikir serta sadar akan keberadaannya yang serba terhubung dengan sesamanya, lingkungannya, alam semesta dan Penciptanya. Selain itu, manusia juga memiliki berbagai motivasi untuk menciptakan suasana damai dan tenteram menuju kebahagiaan, serta demi terselenggaranya keteraturan dalam membina hubungan antara sesamanya. Dan, nilai-nilai Pancasila sesungguhnya telah bersemayam dan berkembang dalam hati sanubari serta kesadaran bangsa Indonesia. Pancasila diyakini akan terus berkembang sebagai pedoman hidup bangsa dalam segala perannya, yaitu berperan sebagai falsafah hidup, sebagai ideologi bangsa dan sebagai dasar negara.

Adapun landasan konstitusional wawasan nusantara adalah UUD 1945. Beberapa hal yang menjadi landasannya, diantaranya bahwa UUD 1945 merumuskan kepribadian segenap bangsa Indonesia serta memberikan gambaran wujud dan wadah „seluruh tumpang darah Indonesia“ seperti tersurat dan tersirat dalam Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945. Dan, di dalam UUD 1945 digambarkan secara jelas bahwa tujuan nasional yang ingin dicapai dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan dan keamanan. UUD 1945 memuat beberapa landasan konstitusional, yaitu adanya pernyataan eksistensi bangsa Indonesia yang menegara dan diwujudkan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat serta berpolitik luar negeri bebas dan aktif, yaitu bebas dalam menjalin hubungan dengan semua negara dan aktif dalam upaya ketertiban dunia, sehingga terjalin hubungan dengan semua bangsa. UUD 1945 mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Indonesia merupakan negara berdasarkan asas kesatuan yang berbentuk republik dan berkedaulatan rakyat. Pelaksanaan kedaulatan sepenuhnya dilakukan oleh MPR. UUD 1945 juga memiliki pendekatan kesejahteraan dalam pengaturan sumberdaya, yaitu bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, juga memiliki pendekatan keamanan, dimana setiap warga negara wajib turut serta dalam pembelaan negara untuk menjamin eksistensi bangsa dan negara Indonesia dengan segala kepentingannya.

Fungsi Wawasan Nusantara dapat dipahami dengan mempelajari perkembangan dan lingkungan keberadaannya. Sejarah mencatat perkembangan wawasan nusantara yang menyertai sejarah bangsa Indonesia. Dimulai pada kurun waktu tahun 1292-1525 M, yaitu pada zaman kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit (1292-1525 M) menguasai seluruh wilayah nusantara termasuk Philipina dan Semenanjung Malaya dan mempunyai visi dan cita-cita luhur untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa secara menyeluruh. Selanjutnya pada tahun 1921, W.R. Supratman menciptakan sebuah lagu berjudul Indonesia Raya yang berisikan aspirasi agar bangsa Indonesia bangkit dan mengobarkan semangat dan kesadaran untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan serta membangun tanah air menjadi tanah yang mulia dan tanah pusaka bagi bangsa Indonesia. Dan lagu Indonesia Raya setelah kemerdekaan menjadi lagu kebangsaan Indonesia hingga sekarang. Pada tahun 1945, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno – Hatta atas nama bangsa Indonesia membacakan teks kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dan, pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila ditetapkan sebagai falsafah dan dasar negara serta UUD 1945 sebagai konstitusi sekaligus merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Dan, akhirnya pada tahun 1957, lahirnya sebuah Konsepsi Negara Kepulauan Indonesia yang merupakan perwujudan Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Dan semua catatan sejarah tersebut telah membuktikan bahwa wawasan kebangsaan atau wawasan nusantara merupakan warisan leluhur yang kemudian terus dijaga untuk mewujudkan keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia hingga kini. Konsepsi wawasan kebangsaan inilah yang seyogianya dipahami untuk mewujudkan dan menjaga keutuhan bangsa Indonesia.

Peranan wawasan nusantara diantaranya dapat dilihat dari lingkungan keberadaannya. Sebagai negara kepulauan yang merdeka, berdaulat dan bersatu, Indonesia harus berada dalam satu kesatuan wilayah yang utuh, terdiri atas wilayah daratan, lautan teritorial dan perairan pedalaman beserta ruang udara di atasnya. Letak Indonesia berada pada posisi silang dan memberikan pengaruh pada faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hankam dan demografi. Dan untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara, perlu adanya ketahanan nasional guna mempertahankan eksistensi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wawasan Nusantara sendiri diharapkan dapat berfungsi untuk membentuk dan membina persatuan, kesatuan dan keutuhan bangsa dan negara Indonesia melalui integrasi nasional tentang seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara. Oleh karena itu, wawasan nusantara merupakan ajaran dasar yang melandasi kebijaksanaan dan strategi pembangunan nasional, baik pada aspek kesejahteraan maupun pada aspek keamanan dalam upaya mencapai tujuan nasional.

Tujuan Wawasan Nusantara sendiri diantaranya adalah memberi pedoman bagi perwujudan cita-cita nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, terdapat dua tujuan wawasan nusantara, yaitu tujuan ke dalam dan tujuan ke luar. Tujuan wawasan nusantara ke dalam adalah untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah dan sosial. Aspek alamiah diantaranya terdiri dari faktor geografi, kekayaan alam dan demografi, sedangkan aspek sosial terdiri atas faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Adapun tujuan wawasan nusantara ke luar adalah ikut serta mewujudkan

kebahagiaan, ketertiban dan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, keadilan sosial dan perdamaian abadi, yaitu mengadakan kerjasama di forum internasional pada bidang politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan serta memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di forum internasional dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip politik diplomasi bebas aktif dan bertanggung jawab.

#### **4. PENTINGNYA PEMBINAAN IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN MELALUI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**

Begitu banyak persoalan singgah dan bermukim di bumi ibu pertiwi ini. Fenomena sosial yang terjadi telah begitu sarat dan merubah pandangan dunia akan mental bangsa negeri tercinta ini. Potret sosial yang nampak saat ini telah begitu mencoreng tananan sosial masyarakat Indonesia yang dahulu terkenal akan kelembutan dan sopan-santunnya. Oleh karena itu, penting kiranya membangun kembali sistem nilai luhur bangsa Indonesia yang telah dituangkan oleh para pendiri negeri sebagai buah pemikiran cerdas dan penuh kebijaksanaan, yang tersirat dan tersurat di dalam Pancasila dan UUD 1945. Bisa saja, kurangnya pemahaman dan pengamalan Pancasila dan UUD 1945 sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara serta sebagai ideologi negara, lebih disebabkan oleh lemahnya sistem pembinaan individu dari mulai tingkat informal (seperti lingkungan keluarga) sampai ke tingkat formal (seperti sistem pendidikan nasional). Selain itu, proses perubahan pikir, ucap dan tindak ini juga tidak terlepas dari adanya perubahan sosial, budaya dan ekonomi akibat adanya era globalisasi ini.

Tidaklah dapat dielakkan lagi bahwa pembekalan kemampuan dan pengetahuan setiap warga negara, menjadi syarat mutlak dalam menumbuhkembangkan nilai-nilai, sehingga setiap individu dapat mengetahui, memahami, dan menghayati untuk kemudian mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam bentuk sikap-sikap yang dapat mencerminkan sifat kejujuran, kebenaran, kekeluargaan dan keadilan yang merata pada setiap komponen bangsa. Oleh karena itu, pembinaan ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan dalam membangun keutuhan NKRI menjadi sangat perlu untuk dilakukan. Pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi jembatan tepat untuk mewujudkan proses dan implementasi pembinaan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan wahana pembinaan terhadap peserta didik untuk dapat mengenal diri dan lingkungannya serta menumbuhkembangkan kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Kealan dan Zubaidi (2007) mendefinisikan warga Negara sebagai rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan Negara. Dalam hubungan antara warga Negara dan Negara, warga Negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap Negara dan sebaliknya warga Negara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh Negara.

Dalam konteks hak dan kewajiban warga Negara ini adalah adanya hak dan kewajiban bela Negara. Pembelaan Negara atau bela Negara adalah tekad, sikap dan tindakan warga Negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara (Kaelan dan Zubaidi, 2007:120). Dan, bela Negara bagi warga Negara Indonesia adalah usaha pembelaan Negara dilandasi

oleh kecintaan terhadap tanah air dan kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia dengan keyakinan pada Pancasila sebagai dasar Negara serta berpijak pada UUD 1945 sebagai konstitusi Negara. Wujud dari usaha bela Negara dalam konteks ini adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga Negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan Negara, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, keutuhan wilayah nusantara dan yurisdiksi nasional serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.<sup>1</sup> Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) dalam Perubahan Kedua UUD 1945 termaktub bahwa usaha bela Negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga Negara. Hal ini menunjukkan adanya asas demokrasi dalam pembelaan Negara yang dicerminkan dalam dua pengertian usaha pembelaan Negara, yaitu (i) setiap warga Negara turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan Negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan UUD 1945 dan perundang-undangan yang berlaku, serta (ii) bahwa setiap warga Negara harus turut serta dalam setiap usaha pembelaan Negara sesuai dengan kemampuan dan profesinya.

Usaha pembelaan Negara bertumpu pada kesadaran setiap warga Negara akan hak dan kewajibannya. Kesadarannya demikian perlu ditumbuhkan melalui proses motivasi untuk mencintai tanah air dan untuk ikut serta dalam pembelaan Negara. Proses motivasi untuk membela Negara dan Bangsa akan berhasil jika setiap Warga Negara memahami keunggulan dan kelebihan Negara dan bangsanya. Disamping itu setiap warga Negara hendaknya juga memahami kemungkinan segala macam ancaman terhadap eksistensi bangsa dan Negara Indonesia. Dalam hal ini terdapat beberapa dasar pemikiran yang dapat dijadikan sebagai bahan motivasi setiap warga Negara untuk ikut serta membela Negara Indonesia, diantaranya : (i) pengalaman sejarah perjuangan RI, (ii) kedudukan wilayah geografis nusantara yang strategis, (iii) keadaan penduduk (demografi) yang besar, (iv) kekayaan sumberdaya alam, (v) perkembangan dan kemajuan IPTEK di bidang persenjataan, dan (vi) kemungkinan timbulnya bencana perang.

Pendidikan Kewarganeraan yang diberikan kepada mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi memang didesain sebagai bagian dari mata kuliah kepribadian. Dimana, tujuan pengajarannya adalah memberikan pemahaman terhadap rasa kecintaan terhadap tanah air, mengenal nilai-nilai luhur ke-Indonesia-an, serta penumbuhan raga kebanggaan atas segenap khasanah sosial, ekonomi, budaya, politik dan sistem pertahanan dan keamanan yang telah turun temurun berlaku dan melembaga dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. Dan pada akhirnya, mahasiswa tersebut dapat dicetak menjadi ilmuwan yang professional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis yang berkeadaban, serta menjadi warga Negara yang memiliki daya saing, berdisiplin dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai dan sejahtera.

Pasal 4 ayat (2) Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas No.43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, disebutkan bahwa muatan pendidikan kewarganegaraan diantaranya meliputi: (i) Filsafat Pancasila, yang meliputi pengetahuan mengenai Pancasila sebagai

---

<sup>1</sup> Kaelan dan Achmad Zubaidi, Pendidikan Kewarganegaraan, (Yogyakarta: Penerbit "PARADIGMA", 2007) hal. 120.

sistem filsafat dan sebagai ideologi bangsa dan Negara; (ii) Identitas nasional, yang meliputi pengetahuan mengenai karakteristik identitas nasional dan proses berbangsa dan bernegara; (iii) Politik dan strategi, yang meliputi pengetahuan mengenai sistem konstitusi, politik dan ketatanegaraan Indonesia; (iv) Demokrasi Indonesia, yang meliputi pengetahuan mengenai konsep dan prinsip demokrasi serta demokrasi dan pendidikan demokrasi; (v) Hak azasi manusia dan *rule of law*; (vi) Hak dan kewajiban warga Negara, yang meliputi pengetahuan mengenai warga negara serta hak dan kewajiban warga Negara Indonesia; (vii) Geopolitik Indonesia, yang meliputi pengetahuan mengenai wilayah sebagai ruang hidup dan otonomi daerah; dan (viii) Geostrategi Indonesia, yang meliputi pengetahuan mengenai konsep *Asta Gatra* serta peranan Indonesia di dunia dan perdamaian dunia.

Disain pengajarannya juga dilakukan dengan mengedepankan sistem pengajaran dua arah dan diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*, FGD). Adapun rambu-rambu pengajaran sesuai dengan amanat Kep Dirjen Dikti No.43/DIKTI/Kep/2006. **Pertama**, proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas, dan kemandirian dengan menempatkan mahasiswa sebagai subjek pendidikan, mitra dalam proses pembelajaran dan sebagai umat, anggota keluarga, masyarakat dan warga Negara.

**Kedua**, pembelajaran yang diselenggarakan merupakan proses yang mendidik, yang didalamnya terjadi pembahasan kritis, analitis, induktif dan reflektif melalui dialog kreatif partisipatori untuk mencapai pemahaman tentang kebenaran substansi dasar kajian, berkarya nyata dan menumbuhkan motivasi belajar sepanjang hayat. **Ketiga**, bentuk aktivitas proses pembelajaran didesain sebagai kuliah tatap muka, ceramah, dialog (diskusi) interaktif, studi kasus, penugasan mandiri, tugas baca seminar kecil dan kegiatan kokurikuler.

Artinya bahwa pendidikan kewarganegaraan memang didesain sebagai upaya persiapan dan penyesuaian diri terhadap perubahan nilai di masa mendatang yang sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dalam negeri maupun eksternal luar negeri, terutama yang berkaitan dengan isu global dan globalisasi itu sendiri.

Persiapan dan penyesuaian diri terhadap arus dan era globalisasi ini harus dimulai dengan adanya (1) ketanggapan terhadap berbagai masalah sosial, politik, budaya dan lingkungan; (2) kreativitas dalam menemukan alternatif pemecahannya; serta (3) efesiensi dan etos kerja yang tinggi. Persiapan dan penyesuaian diri tersebut seyogianya dicirikan dengan adanya (1) kemampuan mengantisipasi perkembangan berdasarkan ilmu pengetahuan; (2) kemampuan dan sikap untuk mengerti dan mengantisipasi situasi; (3) kemampuan untuk mengakomodasi, utamanya IPTEK serta perubahan yang diakibatkannya; serta (4) kemampuan mereorientasi, utamanya kemampuan untuk menyeleksi terhadap arus informasi yang membombardirnya. Pada akhirnya persiapan dan penyesuaian diri dalam era globalisasi ini setidaknya mampu memunculkan (1) pekerja yang terampil yang menjadi bagian utama dari mekanisme produksi (dalam arti luas) yang harus lebih efektif dan efisien; (2) pemimpin dan manajer yang efektif yang memiliki kemampuan berpikir,

mengambil keputusan yang tepat pada waktunya serta mengendalikan pelaksanaan dengan cakap dan wibawa; serta (3) pemikir yang mampu menentukan / memelihara arah perjalanan dan melihat segala kemungkinan di hari depan.

Oleh karena itu, maka pemikiran tersebut dapatlah menjadi sarat mutlak dalam pembinaan dan pengembangan manusia Indonesia yang diarahkan untuk menjadi manusia Indonesia seutuhnya yang sarat dengan nilai-nilai luhur kebudayaan dan perjuangan bangsa yang mengutamakan persatuan dan kesatuan sebagai landasan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mengantisipasi masyarakat global atas adanya perubahan nilai-nilai dan sikap, maka diperlukan suatu pemahaman yang luas terhadap Pancasila sebagai ideologi negara dan UUD 1945 sebagai dasar hukum negara.

Perubahan nilai-nilai dan sikap dengan menumbuhkembangkan pengertian, pemahaman, penghayatan dan pengamalan Pancasila serta UUD 1945 dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem pendidikan formal dan informal. Dalam pendidikan formal, seyogianya tidak hanya teori-teori dasar saja yang diberikan, namun demikian harus dibarengi dengan adanya pola pembentukan pengetahuan dalam bentuk simulasi. Simulasi dimaksud adalah dengan membuat suatu *flatfom* penggalian potensi melalui pengkajian-pengkajian yang dilakukan sendiri oleh anak didik. Hasil dari pengkajian tersebut kemudian dibahas bersama. Model-model diskusi dua arah akan sangat efektif terhadap pemahaman dan penghayatan isi yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.

Selain pendidikan formal, pendidikan informal pun memberikan kontribusi lebih terhadap pembentukan sikap dan perilaku. Pendidikan informal dimaksud dimulai dengan pendidikan dalam keluarga yang diarahkan untuk selalu menanamkan sikap kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang sesuai dengan norma-norma yang ada di lingkungannya, dimana norma-norma tersebut mempunyai nilai yang universal seperti halnya ideologi negara. Pendekatan pembentukan/pengubahan nilai dan sikap diri seseorang dapat juga dilakukan melalui berbagai cara, seperti (1) pembiasaan, (2) internalitas nilai melalui ganjaran-hukuman, (3) keteladanan, (4) teknik klarifikasi nilai, dan sebagainya. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa segenap pendekatan yang dilakukan mempunyai kelebihan dan kekurangan, dimana kesemuanya sangat tergantung pada tingkat belajar para individu dalam hal (1) menerima, (2) menganggapi, (3) menilai dan berkeyakinan, (4) mengorganisasi dan berkonseptual, serta (5) mewataki dan memerankan hasil belajar tersebut.

Sasaran akhir dari pembentukan/pengubahan nilai dan sikap adalah bahwa suatu norma sebagai acuan perilaku telah terwujud dalam perilaku sehari-hari secara konsisten, dengan kata lain sistem nilai telah terbentuk dan mewarnai pandangan hidup dan perilaku seseorang dalam hidupnya. Perubahan nilai dan sikap untuk mengantisipasi masa depan haruslah diupayakan untuk mewujudkan keseimbangan dan keserasian antara aspek pelestarian dan aspek pembaharuan. Nilai-nilai luhur yang mendasari kepribadian dan kebudayaan bangsa Indonesia seyogianya harus tetap dilestarikan, agar terhindar dari krisis identitas, baik sebagai individu, maupun sebagai sebuah bangsa.

## 5. PENUTUP

Membangun keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa dilakukan secara parsial melainkan membutuhkan peran segenap komponen bangsa. Peran tersebut harus dimulai sejak dini dengan memberikan dasar-dasar dan pandangan hidup universal. Nilai universal dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat terdapat dalam Pancasila sebagai dasar dan falsafah bangsa Indonesia.

Peran bersama antar komponen bangsa, pemerintah, swasta dan masyarakat benar-benar diperlukan untuk membangun dan menggiring semangat dan wawasan kebangsaan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembinaan ideologi Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Muatan pendidikan yang diberikan didesain untuk menumbuhkembangkan semangat persatuan dan kesatuan ditunjang oleh pandangan dan wawasan nusantara serta pribadi yang merupakan bagian dari bangsa yang besar yang tahu akan status diri dan lingkungannya.

## REFERENSI

- Kaelan dan Achmad Zubaidi. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Penerbit "PARADIGMA". 207 halaman.
- Kaelan. 2008. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Penerbit "PARADIGMA".
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional Nomor 43/DIKTI/KEP/2006.
- Subandi Al Marsudi. 2003. Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi. Edisi Revisi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sumardi. 2003. Pendidikan Kewarganegaraan. Bogor: Universitas Pakuan.